



Problematika Kebahasaan Dalam Pernyataan Presiden Prabowo (29 Agustus 2025) Tentang Demonstrasi : Analisis Pragmatik Dan Retorika

Desi Novita Sari^{1*}, Musarofah², Subyantoro³, Rahayu Pristiwati³

¹⁻³Program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: novitadesi826@gmail.com

Abstract. *Language holds significant symbolic power in shaping a leader's political image. This study examines President Prabowo Subianto's statement on August 29, 2025, regarding the demonstrations, from the perspectives of pragmatics and rhetoric, in order to reveal how language is used to manage discourse and reinforce governmental legitimacy. This research employs a qualitative descriptive method with content analysis of the official speech text. The findings show that the statement contains various linguistic issues, such as the use of authoritative diction, the presence of implicit and ambiguous meanings, and the balance between emotional and rational utterances. From a rhetorical perspective, the president employs ethos to affirm his image as a dignified and responsible leader; pathos to evoke public sympathy through expressions of condolence; and logos to demonstrate logical reasoning through promises of action and law enforcement. These strategies collectively construct a stable political discourse, yet also hold the potential for problems due to differing interpretations among the public. This study emphasizes that political communication in the context of modern governance cannot be separated from in-depth linguistic analysis, as language plays a crucial role in maintaining legitimacy and social stability. Therefore, greater pragmatic and rhetorical awareness is required in political communication so that national messages can be conveyed effectively, ethically, and contextually.*

Keywords: rhetoric; ethos-pathos-logos; leader's image; political language; pragmatics.

Abstrak. Bahasa memiliki kekuatan simbolik yang besar dalam membangun citra politik seorang pemimpin. Pada penelitian ini, menelaah pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 29 Agustus 2025 tentang demonstrasi dari sudut pandang pragmatik dan retorika guna mengungkap bagaimana Bahasa digunakan untuk mengatur wacana dan memperkuat legitimasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis isi terhadap teks pidato resmi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut memuat berbagai problematika kebahasaan seperti penggunaan diksi yang bernuansa otoritatif, kehadiran makna implisit yang multitafsir, serta penyeimbangan antara tuturan emosional dan rasional. Dari perspektif retorika, presiden menggunakan strategi etos untuk meneguhkan citra sebagai pemimpin yang berwibawa dan bertanggung jawab; patos untuk menimbulkan simpati publik melalui ungkapan duka cita; serta logos untuk menunjukkan penalaran logis melalui janji Tindakan dan penegakan hukum. Strategi tersebut secara bersama-sama membentuk wacana politik yang stabil, namun juga menyimpan potensi problematik karena perbedaan interpretasi di kalangan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi politik dalam konteks pemerintahan modern tidak dapat dipisahkan dari analisis kebahasaan yang mendalam, sebab Bahasa penting dalam menjaga legitimasi dan stabilitas sosial. Dengan demikian, diperlukan kesadaran pragmatic dan retorika yang lebih cermat dalam komunikasi politik agar pesan kebangsaan dapat tersampaikan secara efektif, etis, dan kontekstual.

Kata kunci : retorika; etos-patos-logos; citra pemimpin; Bahasa politik; pragmatik.

1. PENDAHULUAN

Bahasa selalu hadir sebagai representasi ideologi dan kekuasaan. Bahasa bukan hanya sekadar sarana komunikasi, tetapi juga instrument kekuasaan, ideologi, dan legitimasi sosial. Dalam konteks kepemimpinan politik, Bahasa memiliki fungsi strategis untuk membangun citra, menanamkan kepercayaan, serta mengendalikan arah persepsi public terhadap kebijakan pemerintah. Seorang pemimpin yang mampu mengelola Bahasa dengan

efektif akan lebih mudah mempengaruhi pandangan masyarakat dan menciptakan stabilitas makna di tengah keragaman sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap Bahasa politik menjadi penting untuk memahami dinamika hubungan antara kekuasaan dan komunikasi publik, terutama pada momen krisis atau isu sosial yang sensitive seperti demonstrasi.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 29 Agustus 2025 merupakan contoh bagaimana Bahasa digunakan untuk menegaskan posisi politik dan membentuk narasi moral di tengah situasi sosial yang sensitif. Pernyataan tersebut bukan hanya sekadar tanggapan atas peristiwa sosial, melainkan juga refleksi dari strategi komunikasi politik seorang kepala negara. Dalam pidato singkatnya, presiden berupaya menunjukkan keseimbangan antara empati terhadap korban, ketegasan dalam menjaga ketertiban, dan rasionalitas dalam menyampaikan arah kebijakan pemerintahan. Namun demikian, sebagaimana lazimnya wacana politik, pernyataan tersebut memunculkan berbagai tafsir di kalangan masyarakat. Perbedaan interpretasi ini memperlihatkan adanya problematika kebahasaan yang berkaitan dengan konteks pragmatik, dan gaya retorika.

Dalam kajian pragmatik, bahasa dipahami tidak hanya dari makna literalnya, tetapi juga dari konteks, maksud, dan implikatur yang terkandung di dalamnya. Setiap ujaran politik mengandung tindak turur yang memiliki fungsi sosial tertentu — apakah sebagai ajakan, peringatan, penegasan, atau pembingkaian makna. Dalam pernyataan 29 Agustus 2025, misalnya, terdapat kombinasi antara tindak turur representatif, direktif, dan ekspresif yang berfungsi menegaskan tanggung jawab pemerintah sekaligus meredakan ketegangan sosial. Namun, konteks sosial-politik yang kompleks membuat maksud komunikatif tersebut tidak selalu diterima sebagaimana yang diharapkan. Ketidaksesuaian antara maksud penutur dan pemahaman pendengar inilah yang melahirkan problematika kebahasaan dalam konteks pragmatik politik.

Selain itu, dalam perspektif retorika politik, bahasa memiliki fungsi persuasif untuk membangun kepercayaan publik. Seorang pemimpin menggunakan strategi retoris untuk menampilkan kredibilitas diri (etos), menggugah emosi pendengar (patos), dan menyusun argumentasi logis (logos) agar pesan politiknya diterima dengan baik. Pernyataan Presiden Prabowo mencerminkan upaya retoris tersebut melalui pemilihan diksi dan gaya turur yang berimbang antara kehangatan dan ketegasan. Penggunaan kata-kata seperti “ketertiban,” “rasa kemanusiaan,” dan “tanggung jawab bersama” mengandung kekuatan sugestif yang mampu menggerakkan empati publik sekaligus menegaskan posisi moral pemerintah. Namun, kekuatan retorika tersebut juga dapat menjadi sumber problematika ketika unsur emosional dan rasional tidak dipersepsi secara proporsional oleh masyarakat.

Pernyataan Presiden Prabowo pada 29 Agustus 2025 memperlihatkan upaya strategis dalam mengelola retorika dan pragmatik bahasa politik di tengah situasi sosial yang menegangkan. Dengan menggunakan diksi yang bernuansa inklusif dan ajakan moral, Presiden berusaha menciptakan wacana nasional yang menekankan kesatuan dan tanggung jawab bersama. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa yang terlalu hati-hati juga menimbulkan celah interpretasi yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan politik berbeda. Fenomena ini memperlihatkan bahwa bahasa politik selalu berada di antara dua kutub: alat untuk menyatukan dan sekaligus potensi untuk memecah persepsi publik. Maka, analisis kebahasaan terhadap pernyataan ini menjadi penting untuk

memahami bagaimana strategi retorika dan pragmatik digunakan dalam membangun citra sekaligus mengatasi krisis makna dalam komunikasi politik.

Dengan demikian, kajian terhadap pernyataan Presiden Prabowo tidak semata bertujuan untuk menilai isi pesan politiknya, tetapi juga untuk memahami bagaimana bahasa beroperasi sebagai kekuatan sosial. Pendekatan pragmatik digunakan untuk menelusuri makna implisit, tindak tutur, dan implikatur dalam konteks pernyataan, sedangkan pendekatan retorika digunakan untuk menelaah bagaimana unsur etos, patos, dan logos diolah guna membentuk citra kepemimpinan yang ideal. Analisis gabungan kedua pendekatan ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana bahasa politik bekerja dalam membangun citra, mengatur makna, dan menciptakan pengaruh dalam komunikasi publik. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian kebahasaan politik di Indonesia serta memperkaya pemahaman tentang peran bahasa dalam pembentukan wacana kekuasaan di era demokrasi digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis pragmatik dan retorika politik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan bahasa dalam konteks komunikasi politik, yang menuntut pemahaman terhadap makna implisit, konteks sosial, dan niat komunikatif penutur. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menelusuri secara mendalam bagaimana struktur bahasa, dixsi, dan strategi retorika digunakan oleh Presiden Prabowo dalam membangun citra, menyampaikan pesan politik, serta mengelola persepsi publik melalui pernyataannya pada 29 Agustus 2025 terkait demonstrasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis wacana kualitatif. Analisis ini berupaya meneliti teks politik bukan hanya dari sisi bentuk kebahasaan, tetapi juga dari makna yang muncul dalam konteks sosial dan ideologisnya. Dengan analisis wacana, penelitian ini menyoroti cara bahasa berfungsi sebagai sarana pembentukan makna dan legitimasi kekuasaan. Penelitian berupaya mengungkap problematika kebahasaan yang muncul akibat penggunaan strategi pragmatik dan retorika politik yang kompleks, baik dalam struktur kalimat maupun dalam pemilihan dixsi yang bernilai simbolik.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada tanggal 29 Agustus 2025 terkait demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Data diperoleh dari berbagai sumber kredibel seperti siaran langsung media nasional, kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, serta transkrip berita daring dari situs resmi pemerintah. Selain itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas teori pragmatik, retorika politik, serta fungsi bahasa dalam komunikasi kepemimpinan. Sumber-sumber sekunder ini berfungsi memperkuat analisis teoretis dan memberikan pembanding terhadap temuan data primer.

Dalam kerangka analisis, penelitian ini mengombinasikan dua pendekatan utama: analisis pragmatik dan analisis retorika. Analisis pragmatik digunakan untuk menelaah tindak tutur (Austin & Searle), prinsip kerja sama (Grice), serta prinsip kesantunan (Leech) yang tampak dalam tuturan Presiden Prabowo. Analisis ini membantu mengungkap makna implisit, strategi komunikasi, dan nilai-nilai kesantunan politik yang muncul dalam ujaran. Sementara itu, analisis retorika digunakan untuk menelusuri bagaimana unsur etos

(kredibilitas dan kepribadian penutur), patos (daya emosi dan empati), serta logos (logika dan rasionalitas argumen) digunakan untuk membentuk citra dan legitimasi politik. Dengan memadukan kedua kerangka ini, penelitian dapat menjelaskan keterkaitan antara strategi bahasa, gaya komunikasi politik, dan efek retorika terhadap pembentukan opini publik.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen (*textual analysis*). Seluruh proses penelitian dilaksanakan pada rentang waktu Oktober hingga November 2025, bertepatan dengan meningkatnya perhatian publik terhadap komunikasi politik Presiden pasca peristiwa demonstrasi tersebut. Melalui rancangan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana bahasa digunakan secara strategis dalam konteks politik untuk membangun citra, menciptakan legitimasi, serta mengelola wacana publik di tengah dinamika sosial Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Problematika Kebahasaan dalam Pernyataan Presiden Prabowo 29 Agustus 2025

A. Ketidakjelasan Subjek Tindakan dalam Ungkapan Umum

Contohnya: “*tindakan-tindakan anarkis*” dan “*petugas yang berlebihan*”

Masalah: Tidak spesifik siapa yang melakukan “*anarkis*” atau “*berlebihan*” — apakah demonstran, aparat, atau pihak ketiga. Ketidakjelasan ini memungkinkan interpretasi ganda atau kontroversi publik.

B. Penggunaan Kata Seandainya (“if”) yang Bersyarat dan Ambigu

Contoh: “*Seandainya, dikenal mereka berbuat di luar kepatutan ... akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum...*”

Masalah: “*Seandainya*” membuat pernyataan menjadi bersifat hipotetik; hal ini dapat dipersepsi sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab langsung atau menunda aksi, tergantung pada interpretasi pendengar/masyarakat.

C. Diksi yang Mengkonstruksi Pembedaan Moral antara Kelompok

Contoh: “*unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara ... kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan*”

Masalah: Bahasa ini dapat dianggap memmarginalkan demonstran atau pihak tertentu; memunculkan “othering” moral, yakni menggambarkan pihak lain sebagai ancaman atau tidak sah.

D. Penggunaan Imperatif dan Imbauan yang Menggunakan Kata Frasa Normatif

Contoh: “*Saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin*”

Masalah: Imbauan seperti ini bisa dianggap paternalistik, serta mencerminkan ketimpangan relasi pembicara-publik. Juga bisa memunculkan pertanyaan: sampai sejauh mana imbauan cukup untuk menenangkan situasi atau memenuhi kebutuhan masyarakat.

E. Retorika Emosional dan Pemicu Pathos

Contoh: “*Saya sangat prihatin dan sangat sedih*” atas kematian Affan Kurniawan”

Masalah: Penggunaan emosional ini bertujuan membangun koneksi dengan publik, tapi juga bisa dilihat sebagai strategi untuk mengalihkan fokus dari pertanyaan substantif (misalnya: bagaimana insiden bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab

- secara sistemik, tindakan preventif). Ada risiko bahwa emosional digunakan untuk legitimasi politik daripada sebagai penjelasan.
- F. Janji Umum dan Ambiguitas Tindak Lanjut
Contoh: *“Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti.”*
Masalah: “akan kami tindak lanjuti” tanpa keterangan kapan, bagaimana, melalui mekanisme apa, dan siapa yang bertanggung jawab — ini dapat menimbulkan skeptisme atau persepsi bahwa pernyataan tersebut hanya retoris.
- G. Kontras antara “aspirasi yang sah” dan larangan terhadap “kelompok-yang-ingin kerusuhan”
Contoh: *“Aspirasi yang sah, silakan untuk disampaikan. ... kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan”*.
Masalah: Pembedaan ini membuka pertanyaan: siapa yang menilai aspirasi itu “sah” vs tidak sah? Siapa yang menentukan apakah suatu demonstrasi termasuk kelompok “ingin huru-hara”? Batasan moral/kepatutan tidak dijelaskan, sehingga bisa menimbulkan tafsir yang beragam.
- H. Penggunaan Bahasa Kebangsaan dan Nasionalisme sebagai Strategi Persatuan
Contoh: *“bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga ... untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara sejahtera ...”*
Masalah: Ini adalah strategi retoris yang memperlihatkan upaya menyatukan sikap publik, tetapi bisa juga dianggap sebagai memfokuskan diskursus pada identitas nasional dan masa depan, sementara masalah konkret (seperti penyelidikan, pertanggungjawaban, reformasi) mungkin tidak mendapat sorotan detail.
- I. Penggambaran Temporal dan Kekinian yang Memicu Urgensi
Contoh: *“peristiwa tadi malam ... demonstrasi ... pemerintah akan memberikan perhatian ... secepatnya ...”*
Masalah: Bahasa “tadi malam”, “secepatnya”, “sekarang” memberi efek urgensi, tetapi terkadang bisa diledek atau dipertanyakan oleh publik jika tindak lanjutnya tidak terasa. Bisa menimbulkan perbedaan antara apa yang dikatakan dan apa yang dirasakan di lapangan.
- J. Penggunaan Frasa-Empatik dan Pengulangan untuk Penegasan
Contoh: *“sangat prihatin dan sangat sedih”, “telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini ... peristiwa tadi malam...”*
Masalah: Memperkuat emosional dan kredibilitas, tetapi jika dianggap hanya retorika, publik bisa merespons skeptis. Pengulangan bisa juga memperlihatkan ketidakmauan untuk mengungkap detail baru atau substansi yang lebih dalam.
- Strategi Pragmatik**
- A. Penggunaan Salam Multireligius
Pada pernyataan tersebut, Presiden menggunakan salam multireligius di awal dan akhir pernyataan, yaitu *Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita sekalian, Syalom, Salve, Om swastiastu, Namo Buddhaya* di awal dan variasi di akhir.
- B. Penyampaian Empati dan Keprihatinan

Strategi penyampaian empati dan keprihatinan ini salah satu elemen utama dari Patos (daya emosi). Pada pernyataan tersebut, Presiden menyampaikan rasa duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya pengemudi ojol (Almarhum Affan Kurniawan). Presiden juga menyatakan "**sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini**" bertujuan untuk menciptakan kedekatan emosional dengan rakyat dan membangkitkan simpati publik. Namun, strategi ini berisiko dilihat sebagai upaya mengalihkan fokus dari pertanyaan substantive atau hanya sebagai retorika untuk legitimasi politik .

C. Pengakuan Kesalahan dan Transparasi

Strategi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik (*Etos* dan *Logos*) di tengah situasi krisis dengan menunjukkan tanggung jawab dan kesediaan untuk bertindak secara rasional. Pada frasa "**tindakan petugas yang berlebihan**" merupakan tindak tutur Representatif yang secara implisit mengakui potensi pelanggaran atau kesalahan di pihak aparaturnya. Secara pragmatik, ini adalah langkah untuk memenuhi tuntutan publik atas akuntabilitas dan meredakan ketegangan.

Penggunaan frasa "terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan", jika dipadukan dengan janji tindak lanjut hukum (misalnya, "**akan kita tindak sesuai hukum**"), berfungsi sebagai tindak tutur Komisif/Direktif. Hal ini bertujuan menegaskan integritas dan ketegasan pemimpin yang adil dan berprinsip (*Etos*), serta menegaskan dasar logis dari kebijakan penegakan hukum (*Logos*). Unsur "**terkejut dan kecewa**" berfungsi sebagai tindak tutur Ekspresif yang menciptakan daya emosional (*Patos*). Dengan mengekspresikan emosi, Presiden membangun citra sebagai pemimpin yang manusiawi dan berjiwa sosial, yang bertujuan menciptakan kedekatan emosional dengan publik.

D. Imbauan kepada Masyarakat

Imbauan ini adalah salah satu strategi komunikasi politik yang paling penting dalam konteks krisis, bertujuan untuk mengelola emosi publik dan memperkuat posisi pemimpin. Imbauan pada "**Saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin**" adalah tindak tutur direktif yang berfungsi menurunkan ketegangan emosional dan menciptakan stabilitas makna di tengah keragaman sosial. Strategi ini dapat menimbulkan problematika karena dapat dipersepsi sebagai paternalistik atau mencerminkan ketimpangan relasi pembicara-publik.

E. Pembatasan Aspirasi dan Kerusuhan

Strategi ini berfungsi untuk mengatur wacana dengan membuat batasan moral yang tegas. Pada frasa "**Aspirasi yang sah, silakan untuk disampaikan**" adalah tindakan tutur yang bersifat Direktif dalam bentuk izin atau konsesi, menunjukkan bahwa pemerintah menghormati hak-hak demokratis rakyat dan menegaskan legitimasi dari ekspresi publik yang teratur untuk membangun citra pemimpin yang terbuka (*etos*) dan sadar hukum. Pada frasa "**kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan**" adalah tindakan tutur yang bersifat direktif dalam bentuk larangan atau penolakan tegas yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan menetapkan batas moral yang tidak dapat

dilanggar. Larangan ini juga mendukung logos karena menyusun logika bahwa stabilitas adalah syarat utama kemajuan.

F. Janji Tindak Lanjut Aksi Konkret

Strategi ini berfungsi sebagai langkah komunikasi yang vital di masa krisis dengan tujuan ganda, yaitu meyakinkan publik dan menegaskan tanggung jawab pemerintah. Pada frasa "**“Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti”**" menunjukkan bahwa kalimat tersebut didominasi oleh tindak turur komisif tindakan turur yang mengikat penutur (dalam hal ini, Presiden sebagai representasi Pemerintah) untuk melakukan tindakan di masa depan. Pada frasa "**“akan kami catat”**" dan "**“akan kami tindak lanjuti”**" adalah sebuah janji tegas. Janji ini bertujuan menanamkan keyakinan bahwa *ada* upaya serius dan solusi sistematis dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Secara retoris, janji ini memperkuat etos (kredibilitas) Presiden sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen terhadap akuntabilitas. Pada frasa "**“catat”**" dan "**“tindak lanjuti”**" menunjukkan bahwa pemerintah akan bertindak berdasarkan data dan proses yang terorganisasi, bukan berdasarkan emosi. Hal ini membuat pernyataan tampak objektif dan terukur.

G. Peringatan terhadap Ancaman

Strategi peringatan terhadap ancaman dalam pernyataan Presiden berfungsi untuk menggalang kesadaran dan menjaga stabilitas nasional dengan secara tegas menolak dan membatasi potensi kekacauan atau huru-hara. Pada frasa "**“unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara”**" berfungsi untuk membingkai (atau *framing*) isu, mengalihkan fokus dari akar masalah demonstrasi (keluhan masyarakat) ke masalah ketertiban dan keamanan menegaskan bahwa masalah stabilitas bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari faktor eksternal yang berniat merusak.

Pemilihan dixi "**“huru-hara”**" dan "**“chaos”**" adalah tindakan turur Ekspresif yang sarat muatan emosi dan moral. Kalimat ini secara eksplisit mengekspresikan penolakan, kecaman, dan ketidaksetujuan Pemerintah terhadap tindakan-tindakan tersebut, sekaligus mengaitkannya dengan niat buruk "selalu ingin".

Pada frasa "**“selalu waspada”**" diarahkan untuk memobilisasi emosi ketakutan publik terhadap ancaman (Patos). Rasa takut ini kemudian diarahkan menjadi tindakan kooperatif, yaitu mendukung stabilitas yang ditawarkan oleh pemerintah, ada langkah ini bertujuan mengontrol tindakan publik dengan mengikat ancaman huru-hara pada kerugian nasional ("tidak menguntungkan bangsa yang sedang berbenah diri"), Presiden menguatkan argumennya (Logos) bahwa stabilitas adalah prioritas nasional.

H. Penggunaan Bahasa Legal dan Formal

Strategi Penggunaan Bahasa Legal dan Formal dalam pernyataan Presiden Prabowo adalah upaya retoris yang sangat penting, berfungsi untuk membangun kredibilitas dan rasionalitas di mata publik pada saat krisis. Pada frasa "**“sesuai hukum yang berlaku”**" menyatakan bahwa setiap tindakan Pemerintah, baik penegakan atau pemberian sanksi, memiliki landasan legal yang pasti. Ini mengikat semua pihak pada standar hukum. Pada logos (Dukungan Retorika) janji menjamin publik bahwa keputusan akan didasarkan pada rasionalitas hukum dan objektivitas,

bukan pada tekanan politik atau sentimen. Secara implisit berfungsi sebagai peringatan bagi semua pihak. Ini mengkomunikasikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak berdasarkan standar yang legal.

Pada frasa "**secara tuntas dan transparan**" adalah janji (Komisif) kepada publik untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas proses penyelidikan. Tindak turut ini esensial untuk membangun Etos. Dengan memerintahkan pengusutan tuntas, Presiden menegaskan akuntabilitas dan kesediaannya untuk menghadapi fakta, bahkan jika itu merugikan aparat pemerintah. Penggunaan bahasa legal dan formal ini merupakan strategi Logos untuk menstabilkan wacana dan strategi Etos untuk memperkuat legitimasi bahwa Pemerintah bertindak berdasarkan prinsip hukum, bukan kekuasaan semata.

Unsur Retorika (Etos, Patos, Logos) dalam Membangun Citra dan Pengaruh Politik

A. Etos

Pemimpin politik membangun etos agar publik percaya, menghormati, dan menganggapnya layak diikuti.

- 1) Menunjukkan tanggung jawab moral dan empati.

Misalnya, ketika seorang presiden menyatakan "*Saya prihatin atas korban dalam demonstrasi ini*",

Artinya : Presiden membangun citra sebagai pemimpin yang manusiawi dan berjiwa sosial.

- 2) Menampilkan ketegasan dan integritas.

Ungkapan seperti "*Akan kita tindak sesuai hukum*"

Artinya : menunjukkan bahwa pemimpin adil dan berprinsip.

- 3) Menegaskan peran sebagai pelindung rakyat.

Etos juga dibangun lewat citra "*pemimpin yang menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.*"

B. Patos

Dalam komunikasi politik, patos digunakan untuk menggerakkan simpati, kebanggaan nasional, atau rasa takut terhadap ancaman.

- 1) Membangkitkan empati:

Ungkapan seperti "*Saya sedih dan berduka atas kejadian ini*"

Artinya: menciptakan kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat.

- 2) Menyeru persatuan nasional:

Kalimat seperti "*Bangsa kita sedang berjuang bersama menuju masa depan yang lebih baik*"

Artinya: menumbuhkan rasa solidaritas dan nasionalisme.

- 3) Menenangkan situasi sosial:

Ketika publik gelisah, pernyataan seperti "*Saya mohon semua masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah*"

Artinya: memiliki fungsi menurunkan ketegangan emosional.

C. Logos

Logos adalah daya tarik retorika yang mengandalkan logika, fakta, dan penalaran. Dalam politik, logos membuat pesan tampak objektif, masuk akal, dan terukur.

- 1) Memberikan penjelasan sebab-akibat:

- Misalnya: *“Jika ada pelanggaran di lapangan, kami akan tindak sesuai hukum.”*
Artinya: Pemimpin tampak rasional dan tegas.
- 2) Mengemukakan data atau fakta:
Penggunaan kata seperti *“penyelidikan sedang berjalan,”* *“laporan diterima,”* atau *“bukti sedang dikumpulkan”*
Artinya: menegaskan dasar logis dari kebijakan.
- 3) Menghubungkan peristiwa dengan tujuan nasional:
Contoh: *“Stabilitas adalah syarat utama untuk kemajuan ekonomi.”*
Artinya: Menyusun logika politik yang bisa diterima publik.

4. KESIMPULAN

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 29 Agustus 2025 tentang demonstrasi dianalisis menggunakan pendekatan pragmatik dan retorika untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk mengatur wacana dan memperkuat legitimasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis isi terhadap teks pidato resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan tersebut memuat berbagai problematika kebahasaan seperti penggunaan diksi otoritatif, adanya makna implisit yang multitafsir (misalnya, ketidakjelasan subjek tindakan), dan penyeimbangan antara tuturan emosional dan rasional. Dari perspektif retorika, Presiden menggunakan kombinasi strategi etos (untuk meneguhkan citra sebagai pemimpin yang berwibawa dan bertanggung jawab), patos (untuk membangkitkan simpati publik melalui ungkapan duka cita), dan logos (untuk menunjukkan penalaran logis melalui janji tindakan dan penegakan hukum).

Strategi-strategi ini secara keseluruhan berhasil membentuk wacana politik yang stabil, namun di sisi lain, potensi problematik muncul karena perbedaan interpretasi di kalangan masyarakat terhadap diksi yang ambigu atau janji yang umum. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa analisis kebahasaan yang mendalam sangat krusial dalam komunikasi politik modern, sebab bahasa memiliki kekuatan simbolik besar dan peran penting dalam menjaga legitimasi serta stabilitas sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Aristotle. (2007). *Rhetoric* (W. R. Roberts, Trans.). New York, NY: Cosimo Classics.
(Original work published n.d.).
- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Black, E. (1978). *Rhetorical criticism: A study in method*. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Burke, K. (1969). *A rhetoric of motives*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Chilton, P. (2004). *Analysing political discourse: Theory and practice*. London, England: Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta, Indonesia: LKiS.

- Fauconnier, G., & Turner, M. (2002). *The way we think: Conceptual blending and the mind's hidden complexities*. New York, NY: Basic Books.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics: Vol. 3. Speech acts* (pp. 41–58). New York, NY: Academic Press.
- Halliday, M. A. K. (1994). *An introduction to functional grammar* (2nd ed.). London, England: Edward Arnold.
- Hariati, P., & Purwarno. (2025). Ideological rhetoric: A critical discourse analysis of Prabowo's first inauguration speech. *JOALL (Journal of Applied Linguistics and Literature)*, 10(1), 136–156. <https://doi.org/10.33369/joall.v10i1.37663>.
- Harun, K. (2025). Critical discourse analysis of political speech on human rights by Prabowo Subiyanto in the first debate of the 2024 presidential election. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(6), 4661–4667. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2172>.
- Heryanto, A. (2010). *Bahasa dan kekuasaan: Politik wacana di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Bentang.
- Keraf, G. (2010). *Diksi dan gaya bahasa*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.
- Leech, G. N. (1983). *Principles of pragmatics*. London, England: Longman.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, M. (2008). *Analisis wacana kritis: Kajian bahasa dalam wacana media*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Nazreensyah, F. P., Siahaan, D. F., Anargya, H., Hutapea, V. F., & Rangkuti, R. (2025). A pragma-stylistic analysis of President Prabowo Subianto's speech at the 2024 World Government Summit. *International Journal of English Education and Linguistics (IJEEEL)*, 7(1), 70–76. <https://doi.org/10.33650/ijeeel.v7i1.11258>.
- Safi, M., & Medan, P. N. (2025). Deixis in Prabowo's religious-themed speeches: A. [Journal Title Missing], 1, 42–49. Catatan: Judul jurnal tidak tersedia dalam informasi yang diberikan. Harap dilengkapi.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025). Pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai peristiwa demonstrasi dan wafatnya pengemudi ojol di Hambalang, Kabupaten Bogor. Diambil dari <https://setkab.go.id>.
- Selly Sitompul, Octavia Amelia, Albert Zebua, Elyana Manurung, & Meisuri Meisuri. (2025). Analyzing speech act on public sentiment in responses to President Prabowo's new policies post on Instagram. *BLAZE : Jurnal Bahasa Dan Sastra Dalam Pendidikan Linguistik Dan Pengembangan*, 3(3), 20–41. <https://doi.org/10.59841/blaze.v3i3.2822>
- Sutarman, S., Saputra, A., & Abdussamad, Z. (2024). Unveiling power: A Van Dijk discourse analysis of Prabowo's presidential inauguration speech. *EDUMALSYS Journal of Research in Education Management*, 2(3), 211–219. <https://doi.org/10.58578/edumalsys.v2i3.4184>.
- Tarigan, H. G. (2013). *Pengajaran pragmatik*. Bandung, Indonesia: Angkasa..
- Wodak, R. (2009). *The discourse of politics in action: Politics as usual*. London, England: Palgrave Macmillan.

- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Zulfa, S. I., Darmuki, A., & Hidayati, N. A. (2024). Kajian pragmatik tindak turur lokusi, ilokusi, dan perllokusi pada pidato pelantikan Presiden Prabowo Tahun 2024. *Concept and Communication*, null(23), 301–316. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>